

# Jangan Lupakan Perempuan Papua

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

*Demikianlah bunyi Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu berbicara tentang hak asasi.*

## Tri Agung Kristanto

Ketentuan dalam konstitusi ini jelas menjamin hak asasi setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya dalam bidang kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang seharusnya tak bisa dikurangi. Keduanya akan langsung meningkatkan kualitas hidup warga negara.

Namun, perlindungan dalam UUD 1945, yang juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lain, terasa ironis saat menyaksikan nasib perempuan di Papua. Kaum perempuan di provinsi seluas 316.553,07 kilometer persegi itu hampir tak beroleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Bukan sepenuhnya karena kebijakan pemerintah yang membuat perempuan Papua tersisih. Tradisi di wilayah berpenduduk sekitar 3,32 juta jiwa itu, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2018, hidup dalam kelompok suku. Situs Pemerintah Provinsi Papua menuliskan ada 255 suku asli di daerah itu. Sebagian besar suku itu menempatkan lelaki sebagai yang utama.

Perempuan harus bekerja di ladang serta menjaga anak dan ternak. Perempuan tak lebih dari "hak milik" lelaki, yang bisa didaku sejak dalam kandungan ibunya, seperti pada suku Korowai, yang mendiami dataran Danowage di Kabupaten Boven Digul.

Hampir tak ada anak perempuan dari suku Korowai yang bersekolah di Sekolah Lentera Harapan (SLH) yang dibuka di kawasan itu sejak tiga tahun lalu. Kalau ada anak perempuan yang bersekolah, mereka adalah anak suku lain, terutama suku Lani, yang memang datang untuk bersekolah di Danowage.

Menurut guru SLH Danowage, Merry K Tobing, anak perempuan dari suku Korowai memang jarang yang bersekolah. Tak sedikit yang sudah berumah tangga saat berusia kanak-kanak, dengan suami yang berusia jauh lebih tua. Tradisi di suku itu memang memungkinkan perkawinan pada usia dini.

Bahkan, bayi perempuan di suku Korowai bisa dimiliki seorang lelaki saat masih dalam kandungan ibunya. Lelaki itu menitipkan sejumlah barang berharga, dan saat bayi perempuan itu lahir, dia tak lagi merdeka. Bayi perempuan itu sudah menjadi milik pria yang "menitip" dan suatu saat menjadi istrinya.

# Jangan Lupakan Perempuan Papua

(Sambungan dari halaman 1)

Dokter Sri Haryati, Koordinator Klinik Siloam di Papua, menambahkan, mayoritas suku di Papua memiliki tradisi yang mirip dengan suku Korowai. Anak-anak perempuan suku Moi di Kampung Daboto, Kabupaten Intan Jaya; suku Meg di kawasan Nalca, Kabupaten Yahukimo; dan suku Yali di daerah Mamit, Kabupaten Tolikara, bernasib tak jauh berbeda. Mereka tak leluasa bersekolah seperti saudaranya yang laki-laki.

Warga suku Kimyal di lembah Korupun, Kabupaten Yahukimo, lebih terbuka terhadap kesetaraan. Sri Haryati menuturkan, perempuan dari suku Kimyal lebih berkesempatan untuk menempuh pendidikan dan mereka tak jarang menjadi tokoh perubahan dalam sukunya, terutama di bidang kesehatan masyarakat. Tak sedikit perempuan di Korupun yang menjadi kader kesehatan masyarakat.

"Bukan cuma di bidang pendidikan perempuan Kimyal bisa maju, tetapi juga di bidang kesehatan. Perempuan jadi penggerak kesehatan warga. Angka kematian ibu di Korupun nyaris nol karena peran

mama-mama (perempuan) di sana," ujar Sri Haryati, yang sepuluh tahun lebih berkarya di Papua. Angka kematian ibu di Papua tahun 2015 sebesar 489 per 100.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 305.

Welhelmina Soll, perempuan suku Meg di Nalca, mengakui, kesadaran akan pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi perempuan di sukunya kian membaik, sejalan dengan masuknya pengetahuan dan pengajaran dari misi, pemerintah, dan warga lain yang peduli. Dahulu, seperti yang dilakukannya pula, jika ada ternaknya yang mati, dia memotong jarinya. Itu lambang kedudukan serta dipercaya menangkal roh jahat yang bisa mengganggu keluarganya.

"Saya pernah memotong jari ketika 17 babi milik kami mati," papar Welhelmina, sambil menunjukkan telunjuk kirinya yang terpotong dua ruas, pekan lalu. Namun, ia berjanji tak akan melakukannya lagi sebab bagian tubuhnya mulia, seperti yang diyakininya kini. Dia juga menyekolahkan anak-anaknya agar tak tertinggal lagi. BPS Papua melaporkan, angka rata-rata lama sekolah perempuan di Papua ta-

hun 2017 sebesar 10,24; lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 10,65.

## Perang suku

Aileen Hambali Riady, pengurus Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP), menjelaskan, perempuan Papua dulu dilarang sekolah karena pada usia 10-12 tahun sudah dinikahkan. Di Daboto, pernah ada perempuan dinikahi waktu usia muda, tetapi lari kembali ke rumah ibunya. Suaminya marah dan membunuhnya.

"Perempuan di Papua bekerja di ladang dan menjaga anak karena dulu suami perang suku. Kini perang suku tak ada lagi, tetapi tradisi istri menjaga anak (dan ternak), serta bekerja di ladang, berlanjut. Padahal, banyak suami yang menganggur," ujar Aileen yang lebih dari delapan tahun terakhir berkarya di Papua untuk pendidikan dan kesehatan.

Perempuan Papua tak boleh lagi ditinggalkan, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Harus ada keberpihakan pada perempuan di Papua, baik oleh pemerintah atau siapa pun yang peduli pada Papua. Apalagi pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret kemarin....